

## Sistem pengamanan informasi terhadap akta notaris sebagai arsip negara secara elektronik = Electronic information security system for notarial deeds as national archives

Maengkom, Sera K., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20493774&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Notaris adalah pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat perbuatan autentik dan otoritas lainnya, otoritas yang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, yang dikenal sebagai notaris dunia maya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 15, UU No. 2/2014 tentang Pejabat Notaris ( Revisi UU No. 30/2004). Kewenangan tersebut diikuti oleh kewajiban notaris untuk menyimpan, memelihara dan memelihara protokol karena itu adalah arsip negara. Saat ini, notaris telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi baik untuk pekerjaan, sistem kantor, dan yang terkait dengan administrasi negara (misalnya Sistem Administrasi Badan Hukum SABS. Sementara, ada Undang-Undang Arsip yang menyediakan ruang bagi keberadaan catatan elektronik di mana arsip harus memiliki fungsi keaslian dan kepercayaan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan referensi pada aturan dan prinsip yang berlaku di masyarakat, ada kebutuhan untuk penelitian tentang sistem keamanan informasi untuk arsip negara yang dikelola oleh Notaris.

<hr>

Notaries are public officials authorized to make authentic deeds and other authorities, one if which is the authority to certify transactions carried out electronically, known as cyber notaries as stated in explanation of article 15, Law No. 2/2014 concerning Notary Officials (Revised Law No. 30/2004). The authority is followed by the notary's obligation to store, maintain and maintain the protocol because it is a state archive. At present, the notary has used information and communication technology both for jobs, office systems, and those related to state administration for example Legal Entity Administration Systems SABH. While, there is an Archive Law that provides space for the existence of electronic records where the archive must have the function of authenticity and trustworthiness. With a normative juridical research method, using reference to the rules and principles that apply in the community, there is a need for research on information security systems for state archives managed by Notaries.